

Dikeluhkan Masyarakat, Ternyata Tak Berizin

Satpol PP Kulon Progo Sidak Tempat Karaoke di Wates

KULON PROGO - Menanggapi keluhan masyarakat, Satpol PP Kulon Progo melakukan operasi cipta kondisi. Operasi ini menasar tempat karaoke yang tak mengantongi izin dan masuk daftar keluhan masyarakat.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo Alif Romdhoni menyampaikan, seminggu terakhir Satpol PP rutin memantau rumah karaoke. Sedangkan penindakan langsung dilakukan di tiga tempat karaoke. "Ada tiga rumah karaoke di Kapanewon Wates yang sudah kami tindak," ucap Alif, Kamis (13/2).

Alif menyampaikan, tiga tempat karaoke tersebut ditindak lantaran menyalahi kebijakan pemanfaatan usaha. Pasalnya, untuk mendirikan usaha rumah karaoke diperlukan izin yang seharusnya diurus melalui OSS dan klarifikasi dengan DPMPSTP.

Dari tiga rumah karaoke tak ada satu pun yang mengantongi izin. Hanya ada satu tempat karaoke yang telah mengantongi nomor induk berusaha (NIB). Namun, karaoke tersebut tak menyelesaikan proses perizinan. Sehingga tetap dilakukan penindakan. "Ada satu rumah karaoke yang memang dikeluhkan masyarakat," ucapnya.

Alif menyampaikan, pihaknya mendapatkan surat resmi dari masyarakat yang mengeluhkan aktivitas rumah karaoke Blass. Masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas hilir mudik di karaoke. Terutama menjelang ramadan yang seharusnya ditutup sementara.

Selain menindak tempat karaoke, operasi berhasil menjangkit pekerja tempat karaoke yang tak memiliki dokumen kelengkapan. Terdapat dua pekerja karaoke yang tak memiliki



SIDAK: Satpol PP Kulon Progo meninjau lokasi warung karaoke.

Ada tiga rumah karaoke di Kapanewon Wates yang sudah kami tindak,"

ALIF ROMDHONI

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo

izin tinggal, dan hanya bermodalkan KTP. Sehingga, secara aturan perlu segera mengurus izin tinggal dan melaporkan diri ke RT/RW. "Asalnya dari Jawa Barat dan tidak ada kejelasan domisili," ucapnya.

Kedua pekerja itu lantas menerima bimbingan untuk melengkapi dokumen tinggal. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan kejahatan. Selain itu, dokumen tinggal juga menjaga pemilik jika menemui masalah dalam aktivitas sosial masyarakat.

Mengkonfirmasi perihal perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kulon Progo Heriyanto membenarkan rumah karaoke tidak berizin. Menurutnya, keberadaan rumah karaoke di Bumi Binaan kebanyakan tak mengantongi izin. "Jelas tidak berizin, sehingga harapannya dapat mengurus izin," ungkapnya. (gas/prafj)